



**#bangga
melayani
bangsa**
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2025

Nomor : 000.7.6.4/0602/300.05

TAHUN 2024

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);
 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
 - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
 - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
 - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
 - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
 - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
 - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
 - bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - gg. Kecamatan Palaran;
 - hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ii. Kecamatan Samarinda Kota;
 - jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - ll. Kecamatan Samarinda Utara;
 - mm. Kecamatan Sambutan; dan
 - nn. Kecamatan Sungai Pinang.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 FAX. (0541) 741429
S A M A R I N D A – K A L I M A N T A N T I M U R

Kode Pos : 7 5 1 2 1

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
NOMOR : 100.3.3.3/0082-SK/300.06

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 2021 – 2026, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025;
- b. bahwa adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2024 serta adanya kewajiban Pemerintah Kota Samarinda yang harus diselesaikan, maka dapat dilakukan Rencana Kinerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang diatur dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/1/18/2/2021);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 33 tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024;

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada dicantum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyiapkan data dari bidang-bidang untuk menyusun RKA Renja tahun 2025;
2. Mengadakan Rapat Tim Penyusun Rencana Kinerja (Renja) Anggaran;
3. Membuat Laporan Hasil Rapat;
4. Merumuskan program dan kegiatan Rencana Kinerja (Renja);
5. Melakukan Evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun berjalan sebagai bahan penetapan kinerja pada tahun berikutnya;
6. Menyusun data-data Program dan Kegiatan pada tahun berikutnya yang akan dikompilasi sebagai bahan SIPD pada tahun selanjutnya;

- KETIGA : Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tim memperhatikan arah dan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang terintegrasi dengan RPJMD Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 September 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



SUCIPTO, S.Pd, M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda Nomor : **100.3.3.3/0082-SK/300.06** Tanggal 24 September 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda.

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	Ketua
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Sekretariat		
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4.	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda	Koordinator
5.	Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
6.	Pelaksana Bidang Sekretariat dan Perencana Program	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan		
7.	Kepala Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	PPTK
8.	Pejabat Fungsional Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Koordinator
9.	Pelaksana Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Politik Dalam Negeri		
10.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Koordinator
11.	Pejabat Fungsional Bidang Politik Dalam Negeri	Koordinator
12.	Pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat		
13.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	PPTK
14.	Pejabat Fungsional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Koordinator
15.	Pelaksana Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Anggota
16.	Pejabat Fungsional Bidang Organisasi Masyarakat	Koordinator
17.	Pelaksana Bidang Organisasi Masyarakat	Anggota

No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional		
10.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional	PPTK
11.	Pejabat Fungsional Bidang Kewaspadaan Nasional	Koordinator
12.	Pelaksana Bidang Kewaspadaan Nasional	Anggota

Kepala-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



SUCIPTO, S.Pd, M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia dari Allah SWT sehingga Rencana Kerja (RENJA) yang memuat Program-program dan Kegiatan-kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda pada Usulan Anggaran tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD.

Dalam pelaksanaan Program-program dan Kegiatan-kegiatan diperlukan perencanaan dan penyusunan anggaran yang tepat dan sesuai sasaran sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan akan berjalan sesuai harapan.

Kaitan dengan hal tersebut diatas, maka program dan kegiatan hendaknya ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan yang riil.

Pembuatan Rencana Kerja (RENJA) ini sudah menjadi keharusan/kewajiban setiap SKPD dimana nantinya akan menjadi bahan untuk mengikuti MUSRENBANG.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini dapat menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Samarinda, 22 Juli 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



SUCIPTO, S.Pd, M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA TAHUN 2024	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 dan Capaian Renstra	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	35
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya PD ..	40
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD	63
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan	64
3.3. Program dan Kegiatan	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	78
BAB V PENUTUP	
a. Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan	87
b. Kaidah-kaidan Pelaksanaan	88
c. Rencana Tindak Lanjut	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan OPD/Perangkat Daerah kedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2025 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra)..

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Saamarinda dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.



Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menyusun Dokumen Renja 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.



1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta memperhatikan Renja K/L. Penyusunan Rancangan Renja juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan usulan program. Selanjutnya Rancangan Perangkat Daerah ini akan digunakan sebagai proses penyusunan RAPBD tahun 2024. Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda ini juga mengacu pada Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

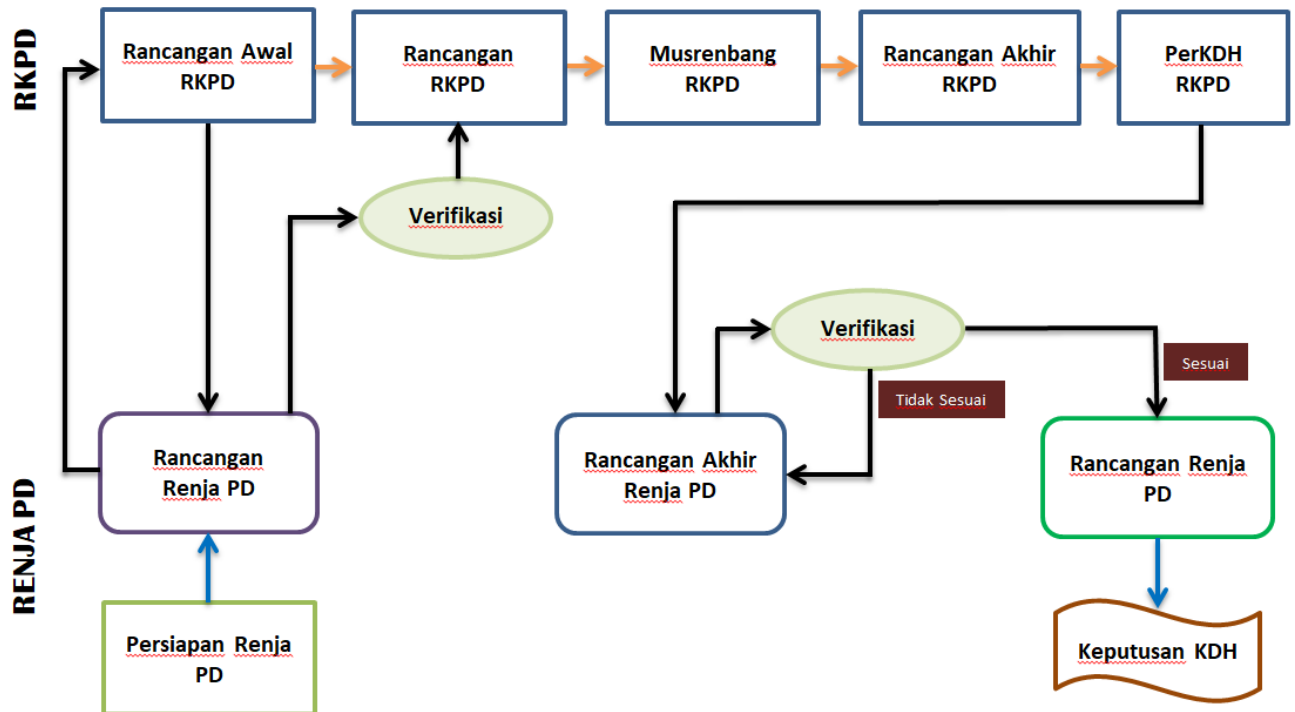
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD.

Dibawah ini bagan alur tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah :



ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PD



Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terkait dengan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Pemerintah Kota yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Timur.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

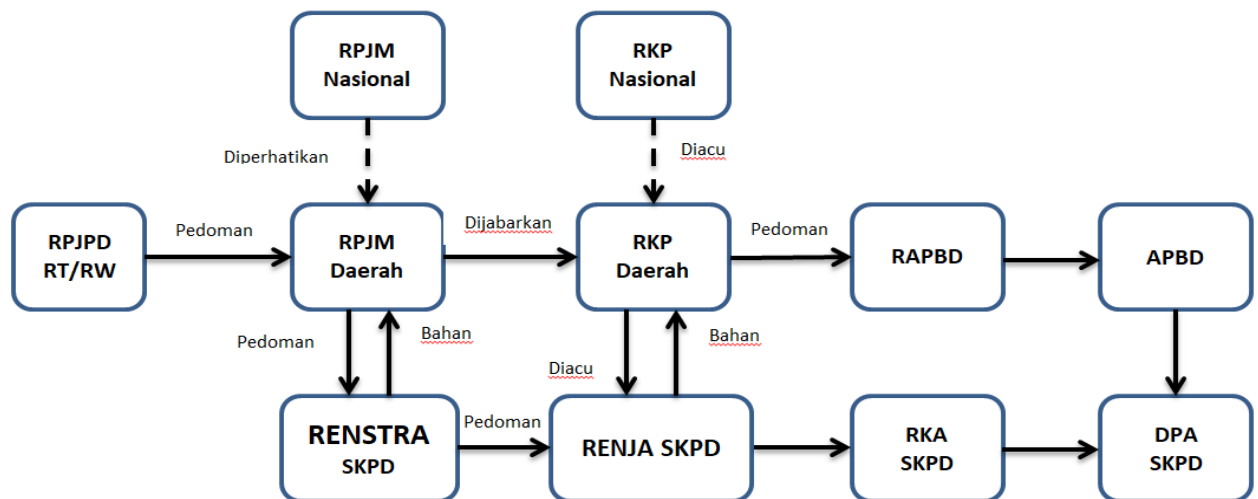


- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian kegiatan yang simultan (bersamaan) dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA PPAS, dan RAPBD.

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian Lembaga dan Renja Pemerintah Kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut :

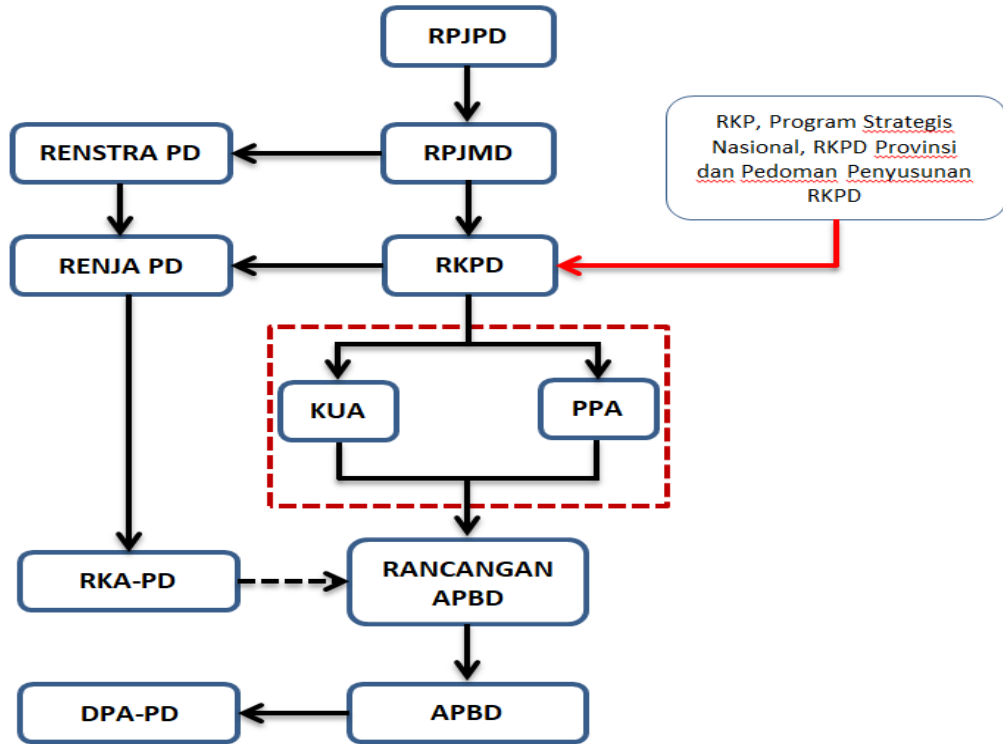
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen RKPD



Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :



Tindak Lanjut Renja dalam proses penyusunan RAPBD



1.2 Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda di susun atas dasar undang-undang dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
 20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
 21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);



22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 33 tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
2. Bahan evaluasi untuk program dan kegiatan tahun berikutnya.
3. Tersusunnya program dan kegiatan sebagai bahan Rencana Kinerja Anggaran sesuai dengan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.



1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang meliputi :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dalam penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 dan Capaian Renstra.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat



Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

2.3 Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;
(Sustainable Development Goals);



4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
 4. Lampirkan Tabel T-C.31
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Visi dan Misi adalah Visi dan Misi RPJMD, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan tahun 2025.

Tabel T-C. 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat data bisa di peroleh dari Laporan Renja di SIPD-RI melalui akun Kepala Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategi. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2024 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2025.

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebesar Rp. **56,472,551,145.-** (*lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **45,313,546,692.-** (*empat puluh lima milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua*



rupiah) atau sebesar 80,24% dari pagu anggaran dari jumlah dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan dan 12 (duabelas) sub kegiatan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda hampir semua target indikator kinerja sebagian besar dapat tercapai, meskipun terdapat juga penyerapan anggarannya belum maksimal.

Realisasi program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 yang telah **memenuhi target kinerja** hasil/keluaran adalah sebagai berikut :

- 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Capaian kinerja sub kegiatan ini 700 orang dari target 700 orang. Anggaran yang dicapai dengan persentase 94,17%. Dengan jumlah anggaran Rp. 1.498.706.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.411.386.391,-
 - 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Capaian kinerja sub kegiatan ini 4 laporan dari target 4 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 92,12%. Dengan jumlah anggaran Rp. 78.466.500,- dan realisasi anggaran Rp. 72.281.500

,-



2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan yaitu :

1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Capaian kinerja sub kegiatan ini 10 dokumen dari target 10 dokumen. Anggaran yang dicapai dengan persentase 100%. Dengan jumlah anggaran Rp. 30.889.546.145,- dan realisasi anggaran Rp. 30.889.544.945,-

2) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Capaian kinerja sub kegiatan ini 2957 Orang dari target 2975 Orang. Anggaran yang dicapai dengan persentase 96,05%. Dengan jumlah anggaran Rp. 7.225.184.000,- dan realisasi anggaran Rp. 6.939.915.843,-

3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Capaian kinerja sub kegiatan ini 12 laporan dari target 12 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 97,76%. Dengan jumlah anggaran Rp. 1.356.614.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.326.182.800,-



3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
Capaian kinerja sub kegiatan ini 25 laporan dari target 25 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 84,73%. Dengan jumlah anggaran Rp. 275.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 233.001.750,-

- 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan sub kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
Capaian kinerja sub kegiatan ini 325 orang dari target 295 orang. Anggaran yang dicapai dengan persentase 96,85%. Dengan jumlah anggaran Rp. 407.091.000,- dan realisasi anggaran Rp. 394.264.400,-
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
Capaian kinerja sub kegiatan ini 20 laporan dari target 20 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 93,90%. Dengan jumlah anggaran Rp. 1.500.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.408.535.259,-
 - 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Capaian kinerja sub kegiatan ini 20 laporan dari target 20 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 93,90%. Dengan jumlah anggaran Rp. 1.500.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.408.535.259,-

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

➤ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dengan sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Capaian kinerja sub kegiatan ini 750 orang dari target 750 orang. Anggaran yang dicapai dengan persentase 93,55%. Dengan jumlah anggaran Rp. 961.037.500,- dan realisasi anggaran Rp. 899.066.694,-

- 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Capaian kinerja sub kegiatan ini 14 Laporan dari target 14 Laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 99,79%. Dengan jumlah anggaran Rp. 175.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 174.639.750,-

- 3) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
 Capaian kinerja sub kegiatan ini 12 laporan dari target 12 laporan. Anggaran yang dicapai dengan persentase 10,98%. Dengan jumlah anggaran Rp. 11.830.906.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.298.720.260,-

Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor penyebab tdk tercapai/ tercapai/ melebihi target	Solusi/Tindak Lanjut
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan	25%	25%	100%	Target Tercapai a. Adanya strategi untuk melibatkan lebih banyak komunitas dan organisasi masyarakat dalam program sosialisasi Pancasila.	1. Menyusun program sosialisasi Pancasila yang terstruktur dan terencana dengan baik. 2. Menyusun program pendidikan



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

	pelajar dan masyarakat					
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700 orang	700 orang	100%	b. Adanya metode pengajaran yang lebih inovatif dan interaktif sesuai dengan Kebutuhan sasaran (Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat). c. Mengajak tokoh masyarakat, Tokoh agama, atau publik figur untuk terlibat dan mengajak partisipasi dalam program sosialisasi. d. Bekerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di lingkungan pendidikan. e. Mengadakan forum dialog secara berkala dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan perwakilan berbagai kelompok masyarakat dan pelajar.	berkelanjutan yang menasar berbagai tingkat pendidikan dan kelompok masyarakat untuk memperkuat pemahaman Pancasila. 3. Menyesuaikan materi sosialisasi dengan isu-isu terkini dan kebutuhan audiens agar lebih relevan dan menarik bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 orang	500 orang	100%	Target Tercapai 1. Penguatan Informasi dan Komunikasi 2. Pengembangan Program Menarik 3. Memastikan aksesibilitas kegiatan sosialisasi dengan mengadakan acara di berbagai lokasi 4. Pengembangan Materi Edukasi 5. Bekerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di lingkungan pendidikan.	Pembentukan Organisasi Masyarakat: • Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) • Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) • Forum Jejaring Panca Mandala (JPM)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Target Tercapai 1. Menyediakan panduan dan prosedur yang jelas untuk pelaksanaan program sosialisasi agar pelaksana memiliki acuan yang tepat Pelatihan berkala terhadap penggunaan sumber daya manusia untuk kebutuhan program	1. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala antara lembaga-lembaga terkait untuk memastikan adanya sinkronisasi dan pembaruan informasi 2. Mengelola sumber daya dengan bijaksana untuk memaksimalkan hasil program dengan anggaran yang tersedia. 3. Menyusun anggaran yang efisien dan terperinci dengan mempertimbangkan prioritas program dan kebutuhan
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	99,80%	99,80%	Target Tercapai 1. Koordinasi Dengan OPD Terkait, Seperti Kecamatan dan Kelurahan 2. Sosialisasi pendidikan pemilih untuk meningkatkan	1. Menyusun dan melaksanakan program pendidikan politik yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelajar, dan mahasiswa.



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Etika Serta Budaya Politik					kesadaran tentang pentingnya pemilu dan proses pemilihan. 3. Sosialisasi Program Kegiatan Terhadap PAM TPS. 4. Bekerjasama dengan aparat keamanan, seperti polisi dan TNI, untuk mengawasi dan melindungi tempat pemungutan suara dan infrastruktur pemilu. 5. Adanya Kolaborasi dengan Sekolah dan Universitas	2. Menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi untuk mempromosikan kegiatan pendidikan politik dan mengajak partisipasi. 3. Pengembangan Materi yang Relevan
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	3800 Orang	3800 Orang	100%		
Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	Target Tercapai Penyusunan anggaran program sesuai kebutuhan	1. Melakukan pelaporan rutin mengenai situasi politik kepada pimpinan untuk memastikan informasi yang relevan disampaikan tepat waktu
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	2975 Orang	2957 Orang	99,39%	Target Tercapai Penyusunan anggaran program sesuai kebutuhan	1. Melakukan pelaporan rutin mengenai situasi politik kepada pimpinan untuk memastikan informasi yang relevan disampaikan tepat waktu



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

	Situasi Politik di Daerah					
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 laporan	12 laporan	100%	Target Tercapai 1. Rapat Koordinasi Berkala 2. Dibentuknya Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah	1. Menyusun kalender koordinasi yang mencakup jadwal rapat dan kegiatan bersama agar semua lembaga dapat merencanakan dan menyesuaikan jadwal mereka dengan baik. 2. Meningkatkan Koordinasi Dengan OPD Terkait, Seperti Kecamatan dan Kelurahan
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	13,41%	11,806%	88,04%	Target Tercapai 1. Sosialisasi dan Pembinaan untuk Ormas / LSM / OKP 2. Pelatihan - pelatihan tentang kegiatan yang bisa dilakukan bagi ormas itu sendiri 3. Penyuluhan dan kegiatan ke Ormas supaya ada ketertarikan mereka untuk ikut peran serta dalam ke Organisasian Kemasyarakatan	1. Mengimbu dan menyarankan bagi seluruh Ormas untuk mendaftar dan melapor keberadaan Organisasi kemasyarakatannya supaya bisa terdata dan tercatat oleh Pemerintah/Badan Kesbangpol Kota Samarinda 2. Menerapkan istilah jemput bola dan memberi arahan kepada Ormas-ormas yang ada
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	12 Ormas	12 Ormas	100%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 laporan	25 laporan	100%	Target Tercapai 1. Penyuluhan tentang dasar hukum Ormas, Perbup No.24 Tahun 2022 tentang pendaftaran ormas dan pelaporan ormas 2. Mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan untuk Ormas / LSM / OKP	1. Meningkatkan Koordinasi Dengan Organisasi Kemasyarakatan 2. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pengawasan ormas
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	35%	35%	100%	Target Tercapai 1. Sosialisasi yang di buat semenarik mungkin dengan mengundang para pelaku ekonomi UMKM khususnya yang bisa menaikkan minat dan bakat dan memberikan kesempatan untuk pengenalan produk yang mereka buat	1. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat umum 2. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan sosial budaya yang terstruktur dan sesuai dengan
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	40 laporan	40 laporan	100%		



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				2. Sosialisasi dan koordinasi kepada OPD terkait jadwal rapat dan kegiatan 3. Sosialisasi tentang pemahaman kepada masyarakat umum khususnya sehingga dapat memahami peraturan dan regulasi dan ketentuan yang sudah ada di tetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	kebutuhan masyarakat umum 3. Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan yang berkelanjutan untuk pelaksana, termasuk pelatihan mengenai regulasi tempat ibadah
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 orang	600 Orang	100%	Target Tercapai 1. Penguatan Informasi dan Komunikasi 2. Pengembangan Program Menarik 3. Memastikan aksesibilitas kegiatan sosialisasi dengan mengadakan acara di berbagai lokasi 4. Pengembangan Materi Edukasi	1. Menyusun kalender koordinasi yang mencakup jadwal rapat dan kegiatan bersama agar semua lembaga dapat merencanakan dan menyesuaikan jadwal mereka dengan baik. 2. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan sosial budaya yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25 laporan	25 laporan	100%	Target Tercapai 1. Penyusunan jadwal koordinasi antar pihak terkait adwal rapat dan kegiatan 2. Membuat Kegiatan yang tidak selalu monoton di setiap pelaksanaanya	1. Mengadakan Rapat Rutin antar Pihak terkait untuk membahas bersama, merencanakan kegiatan, dan menyamakan tujuan. 2. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan sosial budaya yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20%	20%	100%	Target Tercapai 1. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendeteksi dan menangani potensi konflik. 2. Pelatihan SDM Terhadap Program Deteksi Dini Rawan Konflik	1. Menyusun dan melaksanakan program pencegahan konflik sosial yang mencakup edukasi tentang toleransi, resolusi konflik, dan penanganan perbedaan. 2. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi tanda-tanda awal potensi konflik sosial, seperti peningkatan ketegangan atau isu-isu sensitif yang muncul di masyarakat 3. Memanfaatkan Media Sosial Untuk
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 kasus	24 kasus	100%		



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

						Monitoring Potensi Konflik 4. Menyusun Peta Rawan Konflik
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	750 orang	750 orang	100%	Target Tercapai 1. Koordinasi lintas sektor yang melibatkan perwakilan dari Setiap Instansi Terkait dengan menyelesaikan konflik sosial yang ada 2. Pelatihan kepada staf tentang teknik pengumpulan data yang akurat dan metode analisis untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan.	1. Menyusun kalender koordinasi yang mencakup jadwal rapat dan kegiatan 2. Melaksanakan program edukasi yang menjelaskan manfaat partisipasi dalam kegiatan kewaspadaan nasional dan dampaknya terhadap masyarakat.
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 dokumen	14 dokumen	100%	Target Tercapai 1. Menyusun kalender koordinasi yang mencakup jadwal rapat dan kegiatan	Mengadakan forum koordinasi rutin antara lembaga untuk membahas isu-isu bersama, merencanakan kegiatan, dan menyelaraskan tujuan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 dokumen	11 dokumen	100 [^]	Target Tercapai 1. Menyusun kalender koordinasi yang mencakup jadwal rapat dan kegiatan	Mengadakan forum koordinasi rutin antara lembaga untuk membahas isu-isu bersama, merencanakan kegiatan, dan menyelaraskan tujuan



2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Realisasi program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut :

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan yaitu :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Capaian kinerja sub kegiatan ini 544 orang dari target 715 orang atau 100%. Anggaran yang dicapai dengan persentase 96,73%. Dengan jumlah anggaran Rp. 275.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 266.007.100,- hal ini dikarenakan adanya waktu pelaksanaan kegiatan yang mendekati akhir tahun sehingga penyesuaian jadwal tidak terlaksana secara maksimal.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor penyebab tdk tercapai/ tercapai/ melebihi target	Solusi/Tindak Lanjut
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	13,41%	11,806%	88,04%	Target Tidak Tercapai 1. Terbatasnya intensitas kegiatan untuk mensosialisasikan mengenai penguatan kelembagaan Ormas/LSM 2. Terbatasnya intensitas kegiatan untuk mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas 3. Kurangnya kegiatan yang melibatkan tokoh-tokoh agama dalam menjalin dan menjaga kerukunan antar umat beragama 4. Terbatasnya anggaran dalam memfasilitasi tokoh-tokoh agama dalam menjalin dan menjaga kerukunan antar umat beragama	1. Mengimbu dan menyarankan bagi seluruh Ormas untuk mendaftar dan melapor keberadaan Organisasi kemasyarakatannya supaya bisa terdata dan tercatat oleh Pemerintah/Badan Kesbangpol Kota Samarinda 2. Menerapkan istilah jemput bola dan memberi arahan kepada Ormas-ormas yang ada
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	12 Ormas	12 Ormas	100%		



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	715 orang	544 Orang	76,08%	Target Tidak Tercapai 1. Kurangnya Pemahaman Ormas terhadap Peraturan Perundangan Undangan tentang Ormas 2. Kurangnya Peran Ormas dalam pembangunan	1. Mengadakan pelatihan - pelatihan atau bimtek untuk lebih kenal dan memahami tentang tata cara yang lebih efektif 2. Meningkatkan Koordinasi Dengan Organisasi Masyarakat Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pengawasan ormas
---	--	-----------	-----------	--------	--	---

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Setelah ada penyesuaian target dan anggaran tentunya akan ada implikasi pada pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran sesuai yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja maupun Rencana Strategis.

Namun pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditangani oleh bidang teknis dampak atau implikasinya akan jauh terasa. Pada tahun 2023 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa mengakomodir target kinerja sesuai dokumen Renstra maupun dokumen Renja karena beberapa faktor alasan, dan umumnya karena disebabkan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sehingga mengharuskan adanya penyesuaian target dan anggaran pelaksanaan kegiatan, ditambah lagi ada rasionalisasi anggaran yang menyebabkan semua Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Samarinda dipotong anggaran belanja satuan kerjanya, yang tentunya hal ini berakibat pada semakin rendahnya kemampuan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen Renstra maupun di dalam Renja Perangkat Daerah.

2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi beberapa faktor diatas antara lain :

- a. Setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan indikator dan target



- kinerjanya bisa tepat, akurat dan rasional yang kedepannya akan mempermudah disaat proses penjabaran ke dalam kegiatan (penyusunan rincian belanja).
- b. Ada komitmen dari bidang sebagai pelaksana kegiatan, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada.
 - c. Perlu ada jaminan kepastian dalam penetapan/pemberian pagu anggaran kepada PD, sering terjadi keadaan di PD dimana target kinerja dan anggaran dalam suatu dokumen berbeda dengan target dalam dokumen turunannya, karena ternyata pagu anggaran yang dikucurkan pada PD oleh Pemerintah Kota jauh lebih kecil dari pagu yang diminta atau ditargetkan oleh PD, sehingga mau tidak mau perlu ada pengurangan target dan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan. Dalam hal ini karena sangat terkait dengan adanya peningkatan atau penurunan pendapatan dan belanja dalam APBD tahun berjalan.

Tabel. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025

Tabel. 29
Hasil Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2024		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	80,00	76,50	76,60	76,60	1,00	76,70	229,80	2,87	Badan Kesbangpol Kota
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	80,70	80,20	80,20	80,20	100%	80,40	240,80	2,98	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	5	5	5	100%	5	15	0,75	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	1	1	1	100%	1	3	0,75	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	4	4	4	100%	1	9	1,29	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	28	7	7	7	100%	7	21	0,75	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	260	65	65	65	100%	65	195	0,75	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	160	40	40	40	100%	40	120	0,75	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	20	5	5	5	100%	5	15	0,75	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Orang	420	105	105	105	100%	105	315	0,75	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	400	90	90	90	100%	100	280	0,70	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	0	0	0	0%	20	20	0,33	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2024		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	10	0	0	0	0%	3	3	0,30	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	20	5	5	5	100%	5	15	0,75	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	8	0	0	0	0%	4	4	0,50	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	0	0	0%	1	1	0,08	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	102	12	20	20	100%	25	57	0,56	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	Laporan	7	0	0	0	0%	3	3	0,43	
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	6	0	0	0	0%	2	2	0,33	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	24	0	0	0	0%	1	1	0,04	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	0	0	0	0%	12	12	0,25	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	138	36	36	36	100%	36	108	0,78	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	40	0	10	10	100%	10	20	0,50	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72	18	18	18	100%	18	54	0,75	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	48	12	12	12	100%	12	36	0,75	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2024		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	1	1	1	100%	1	3	0,75	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	Persen	30,00%	20,83%	25%	25%	100%	29,17%	0,75	250,00%	Badan Kesbangpol Kota Samarinda
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	4400	500	700	1075	154%	1000	2575	0,59	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	4494	894	700	1075	154%	1200	3169	0,71	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	39	3	12	11	92%	8	22	0,56	
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	13	0	0	0	0%	4	4	0,31	
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	900	0	0	0	0%	300	300	0,33	
8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Orang	164	0	0	0	0%	44	44	0,27	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3,00	Badan Kesbangpol Kota Samarinda
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Orang	7200	1100	3800	2975	78%	1000	5075	0,70	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2024		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	40	10	10	10	100%	10	30	0,75	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	18575	1125	2450	2975	121%	10000	14100	0,76	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	248	200	12	12	100%	12	224	0,90	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	Persen	16,34%	13,41%	14,63%	14,63%	100%	15,85%	0,44	2,69	Badan Kesbangpol Kota
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Jumlah Ormas yang dibina	Ormas	153	11	23	23	100%	25	59	0,39	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	2400	300	600	540	90%	600	1440	0,60	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	185	23	20	12	60%	25	60	0,32	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke	Persen	39%	30%	35%	35%	100%	40%	1,05	2,69	Badan Kesbangpol Kota Samarinda

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra PD s/d 2024		Unit PD Penanggung Jawab
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Triw I Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	165	30	35	35	100%	40	105	0,64	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2400	325	600	220	37%	600	1145	0,48	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	108	3	35	12	34%	25	40	0,37	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	Persen	20%	20%	20%	20%	100%	20%	0,60	3,00	Badan Kesbangpol Kota Samarinda
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	Kasus	96	24	24	24	100%	24	72	0,75	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	4750	300	750	285	38%	1000	1585	0,33	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	56	23	14	13	93%	14	50	0,89	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	48	12	11	12	109%	12	36	0,75	



Berdasarkan tabel 29 diatas yang menunjukkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2024 serta target dan realisasi tahun 2024 (tahun berjalan), terdapat indikator capaian 57 terdiri dari 6 program, 12 indikator kegiatan, dan 39 indikator sub kegiatan.

Ada 44 indikator kinerja pada tahun 2024 tercapai sesuai target kinerja dan 3 indikator capaian kinerja belum/tidak tercapai sesuai target Sedangkan capaian kinerja tahun 2024 belum terealisasi 1 indikator capaian kinerja. Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan jadwal pelaksanaan terlalu mepet dengan akhir tahun sehingga penjadwalan dan koordinasi dengan beberapa lembaga-lembaga terkait sinkronisasi dan pembaruan informasi tidak terealisasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan, dan kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda juga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga untuk menilai kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menilai berdasar capaian indikator program.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya yang termuat dalam RPJMD Kota Samarinda dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2021 – 2026.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan,



pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.

- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.
- c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

Susunan organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas terdiri dari :

- a. Kepala Badan
membawahi :
1 (satu) Sekertaris dan 5 (lima) Bidang :
- b. Sekertaris
membawahi :
 - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 3) Jafung Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Membawahi :
 - 1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi
 - 2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Politik Dalam Negeri
membawahi :
 - 1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik
 - 2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

membawahi :

- 1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
- 2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Agama
Kemasyarakatan dan Ekonomi

f. Bidang Kewaspadaan Nasional

membawahi :

- 1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan
Pengawasan Orang dan Lembaga Asing
- 2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2023, memiliki jumlah pegawai sebanyak 73 orang, yang terdiri dari 39 orang PNS, 14 orang PTTB, dan 20 orang PTTT.

Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan dimasing-masing Bidang

No.	Bidang	Jabatan	Jumlah
1.	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	1 Orang
2.	Sekertariat	Sekertaris	1 Orang
		Subbag	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	22 Orang
3.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	7 Orang
4.	Bidang Politik Dalam Negeri	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	10 Orang
5.	Bidang Ekososbud	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	2 Orang
		Staf	11 Orang
6.	Bidang Kewaspadaan Nasional	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	10 Orang
Jumlah			73



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan mencapai 16,44 % di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Berikut Tabel analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Terlampir : Tabel. 30)

Tabel 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah (PD) : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil Penilaian Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda			80,2	80,4	80,5	80.6	51,57	70,75	80,5	80.6	Realisasi 2023 & Proyeksi 2025-2026 mencapai target
2	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat			25%	29,17%	33.33%	41.67%	23.52%	5.31%	33.33%	41.67%	
3	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik			100%	100%	100%	100%	99.20%	67.72%	100%	100%	
4	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan			14.63%	15,85%	17.07%	20.73%	12.17%	5.28%	17.07%	20.73%	
5	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan			35%	40%	45%	45%	33.09%	18.83%	45%	45%	
6	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti			20%	20%	20%	20%	3.66%	5.73%	20%	20%	



Beberapa program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi beberapa faktor.

Pendidikan politik belum tercapai sesuai target. Hal ini disebabkan penyelenggaraan Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan masih menggunakan metode sosialisasi formal berdasarkan ketersediaan anggaran. Idealnya pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dapat dilaksanakan di tengah tengah kegiatan masyarakat sehari-hari baik melalui selebaran, siaran radio, keramaian pasar, penyampaian dalam upacara bendera di sekolah-sekolah, dan sebagainya. Resiko dari tidak tercapainya target Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, meningkatnya potensi konflik sosial, penyalahgunaan narkoba dan potensi tumbuhnya paham radikalisme, dan tidak tercapainya target IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Banyak kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III dan IV yang turut menyumbang dalam belum tercapainya target target dari kinerja.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah

✚ Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tahun 2024 dapat di kategorikan “Kurang”. Pencapaian Kinerja Pelayanan menunjukkan bahwa realisasi capaian belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun identifikasi yang dilakukan mengenai hal-hal penting dan kritis yang terkait dengan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yakni :

1. Pembinaan ideologi, kerukunan, kemasyarakatan dan kewaspadaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas dari segala ancaman, hal penting dan kritis yang dilaksanakan pada kegiatan terkait kinerja pelayanan yakni :
 - Rasa cinta tanah air
 - Pemahaman wawasan kebangsaan
 - Tingkat implementasi nilai-nilai pancasila
 - Pembinaan kerukunan umat beragama
 - Pembinaan terhadap Ormas



- Fanatisme kedaerahan
 - Tingkat penyalahgunaan/peredaran narkoba, premanisme, radikalisme, terorisme, tawuran pelajar, dan tawuran antar warga/kelompok
 - Tingkat keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini
2. Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi dan Peningkatan Partisipasi Pemilu, hal penting dan kritis yang dilaksanakan pada kegiatan terkait kinerja pelayanan yakni :
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam lembaga-lembaga demokrasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum
 - Tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga demokrasi
 - Program pembinaan penguatan nilai-nilai demokrasi

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda antara lain :

1. Pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada bidang tersebut diatas yakni ;

- Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan
- Menurunnya implementasi nilai-nilai pancasila
- Masih adanya fanatisme kedaerahan

2. Pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang Politik Dalam Negeri.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada bidang tersebut diatas yakni ;

- Masih kurangnya tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum
- Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam lembaga lembaga demokrasi



- Kurangnya tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga lembaga demokrasi
 - Program pembinaan penguatan nilai-nilai demokrasi
3. Pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada bidang tersebut diatas yakni ;

- Masih kurangnya toleransi di masyarakat
 - Masih merebaknya penyalahgunaan/peredaran narkoba, premanisme, radikalisme, terorisme, tawuran pelajar, dan tawuran antar warga/kelompok.
 - Masih kurangnya program-program pembinaan kerukunan umat beragama
 - Masih kurangnya program-program pembinaan terhadap Ormas
4. Pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang Kewaspadaan Nasional.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada bidang tersebut diatas yakni ;

- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini

✚ Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah serta Capaian Program Nasional/Internasional

- Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepala Daerah Periode 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi melaksanakan misi ke 3 yaitu : *“Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”* dengan sasaran Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter



Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial.

- Dalam lingkup nasional, penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mendukung Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum selaku pembina penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun Visi dan Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri adalah :

Visi : *Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik berdasarkan Pancasila*

Misi : - Memperkuat Stabilitas Sosial dan Politik Dalam Negeri
- Penguatan Kehidupan yang Demokratis Berdasarkan Pancasila
- Penguatan Nilai-nilai Pancasila serta Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

- Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda juga turut mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kota Samarinda 2023-2026, khususnya pada indikator:
 - Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk
 - Kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota

Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Pertambahan penduduk yang sangat cepat sehingga kesulitan memonitor aktifitas masyarakat secara optimal.
2. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik masih kurang.
3. Kesenjangan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial
4. Letak wilayah Samarinda seperti daerah pegunungan dapat menghambat dalam memantau kegiatan masyarakat.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggar hukum masih tebang pilih.



6. Pembangunan daerah kurang memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

Adapun peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan sebagai berikut :

1. Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBD Propinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Dukungan partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ORMAS, OKP, LSM serta mahasiswa dan pelajar dalam pelaksanaan pembinaan dibidang kesbangpol.
3. Adanya keterkaitan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021 – 2026.
4. Terbentuknya Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) dalam mengantisipasi kerawanan-kerawanan konflik sosial di masyarakat.
5. Terbentuknya Forum Wawasan Kebangsaan Kecamatan (FPK) sekota Samarinda.

Formulasi Isu-isu Penting

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, aktivitas yang perlu mendapat perhatian pada tahun 2025 antara lain :

No.	Program	Aktivitas yang perlu ditindaklanjuti
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) - Peningkatan Pemahaman Ideologi Bangsa dalam rangka Membangun Karakter Anak Bangsa Yang Berjiwa Pancasila - Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Paskibraka dan Purnapaskibraka - Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Gabungan Paskibraka - Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) - Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - Peningkatan Kesadaran Bela Negara - Peningkatan Kapasitas Bela Negara - Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) - Pemantapan Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

		<ul style="list-style-type: none">- Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Organisasi Perempuan- Pemusatan Latihan dan Penguatan Paskibraka- Pembinaan Kepaskibrakaan Dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari-Hari Nasional
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	<ul style="list-style-type: none">- Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memiliki Keterwakilan Di DPRD Kota Samarinda- Hibah Uang untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda- Hibah Uang untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda- Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik dalam Rangka Kesetaraan Gender- Peningkatan Etika dan Budaya Politik Dalam Berdemokrasi- Meningkatkan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan- Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan Upacara / Apel
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Kerukunan Umat Beragama- Dialog Interaktif- Peningkatan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika- Pelaksanaan Dialog Membangun Semangat Cinta Seni Dan Budaya- Pelaksanaan Silaturahmi Pemerintah Daerah Dengan Pemuka Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan Kota Samarinda
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Peta Rawan Konflik- Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme dan Gerakan Radikalisme di Kota Samarinda- Dialog Interaktif Manajemen Konflik dan Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat Kota Samarinda- Peningkatan Pencegahan Tawuran- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten/Kota (Forkopimda)

2.4 Review terhadap Rancangan Renja RKPD

Proses yang dilakukan dalam review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan. Proses tersebut merupakan penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pagu indikatif dalam Rencana Kerja yang perlu ditinjau kembali sebelum ditetapkan dalam RKPD.

Berikut Hasil Review terhadap Rancangan Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 Kota Samarinda (Terlampir : Tabel. 31)

Tabel. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit PD Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10 Kecamatan di Samarinda	Nilai IKM	88 nilai	14,225,624,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10 Kecamatan di Samarinda	Nilai IKM	76,80 nilai	9,791,574,675	Badan Kesbangpol Kota Samarinda	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	80,5 nilai	200,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	80,5 nilai	250,000,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150,000,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50,000,000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	11,350,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	8,110,950,675		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	10,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	6,991,340,247		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	1,300,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	1,069,610,428		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai	105 orang	240,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai	105 orang	160,000,000		

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit PD Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 paket	60,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 paket	60,000,000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	180,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	100,000,000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	537,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	437,500,000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	10,000,000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	200,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	100,000,000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 paket	10,000,000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	17,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	17,500,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	35,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	35,000,000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	3,000,000		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	12,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	12,000,000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	250,000,000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan rencana kebutuhan barang	12 Laporan	73,124,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan rencana kebutuhan barang	12 Laporan	73,124,000		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	63,124,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	63,124,000		
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	10,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	10,000,000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit PD Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1,600,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	600,000,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25,000,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	50,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	50,000,000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	1,500,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	500,000,000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Laporan	25,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Laporan	25,000,000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	225,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	160,000,000		Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	70,000,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	65,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	-		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang	12 Unit	10,000,000	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang	12 Unit	10,000,000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	80,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	80,000,000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit PD Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	33.33%	2,721,452,700	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	33.33%	2,150,000,000		Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1200 Orang	2,721,452,700	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1200 Orang	2,150,000,000		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800 Orang	506,090,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800 Orang	300,000,000		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Laporan	218,545,400	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Laporan	100,000,000		
	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan	4 Dokumen	200,000,000	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan	4 Dokumen	150,000,000		
	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	300 Orang	1,800,000,000	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	300 Orang	1,500,000,000		
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	40 Orang	100,000,000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	40 Orang	100,000,000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit PD Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	6,102,519,121	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	3,750,000,000		Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1200 Orang	6,102,519,121	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1200 Orang	3,750,000,000		
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	2,200,000,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	2,250,000,000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit PD Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2500 orang	2,402,519,121	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2500 orang	1,000,000,000		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	1,500,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	500,000,000		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	17.07%	550,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	17.07%	280,000,000		Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang dibina	45 Ormas	550,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang dibina	45 Ormas	280,000,000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit PD Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	275,000,000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	130,000,000		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Laporan	275,000,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Laporan	150,000,000		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	45%	1,322,005,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	45%	1,180,000,000		Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	45 Laporan	1,322,005,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	45 Laporan	1,180,000,000		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	271,405,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	150,000,000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit PD Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Laporan	1,050,600,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Laporan	1,030,000,000		
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20%	2,582,454,450	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20%	2,350,000,000		Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 Kasus	2,582,454,450	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 Kasus	2,350,000,000		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 Orang	273,181,750	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 Orang	250,000,000		

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Unit PD Penanggung Jawab	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	109,272,700	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	100,000,000		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2,200,000,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2,000,000,000		
Total					27,504,055,271	Total					19,501,574,675	

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Review terhadap Rancangan awal RKP Tahun 2025 dengan hasil Analisis Kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sammarinda tahun 2025 terdapat beberapa perbedaan.



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alasan
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Untuk menunjang program prioritas daerah WTP dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel maka terjadi efisiensi anggaran dari rancangan awal
2.	Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan• Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan• Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka• Pembentukan Paskibraka	Untuk menunjang program prioritas daerah maka terdapat penambahan anggaran pada kegiatan sosialisasi, monev, pembinaan Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka dan pembentukan Paskibraka
3.	Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Untuk menunjang program prioritas daerah maka terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan dana hibah bantuan KPU dan Bawaslu, dan kegiatan pembinaan dan monev. Politik



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alasan
	<p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah• Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
4.	<p>Program : Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah• Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Untuk menunjang program prioritas daerah maka terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan pembinaan Ormas dan monev. Ormas



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alasan
5.	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Untuk menunjang program prioritas daerah maka terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan monev.
6.	<p>Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Untuk menunjang program prioritas daerah maka terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan dan kegiatan pembinaan dan monev dan dana hibah dari Pemerintah Kota untuk Polda
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	



Dalam rangka percepatan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang dibebankan pada APBD dalam pembebanan belanja tidak langsung yang tidak mencukupi maka Pemerintah Kota Samarinda melakukan realokasi belanja pada beberapa Perangkat Daerah yang mengharuskan Perangkat Daerah melakukan refocusing anggaran. Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 terdapat penyesuaian anggaran dengan Rencana Kerja RKPD tahun 2024 dan disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan maka pagu indikatif Rancangan Awal RKPD lebih besar dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Dalam tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut diatas meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk program dan kegiatan. Adapun untuk besaran pagu anggaran disesuaikan dengan kemampuan daerah APBD Kota Samarinda yang mana diprioritaskan untuk pembangunan Kota Samarinda.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tidak ada usulan dari masyarakat. Berikut tabel usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 Kota Samarinda:

Berikut Tabel Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Samarinda (Terlampir : Tabel. 32)



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Tabel. 32

Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja Program	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Samarinda	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	Kegiatan ini diadakan untuk memperkuat rasa persatuan. Kesatuan dan Rasa Cinta Tanah Air
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1200 Orang	
2	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1200 orang	
3	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang dibina	45 Ormas	
4	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Persentase Kebijakan di Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	45 laporan	
5	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	20 Persen	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 kasus	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Analisis Rencana Kerja Kementerian / Lembaga dan SKPD Pemerintah Kota yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi dan Sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Pemerintah Kota terhadap sasaran Rencana Kerja Kementerian / Lembaga dan SKPD Pemerintah Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terkait dengan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Pemerintah Kota yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Timur.

Korelasi dengan kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
6. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.



Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu :

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
2. Ekonomi.
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),
4. Politik.
5. Pertahanan dan Keamanan.
6. Hukum dan Aparatur.
7. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Sesuai tugas dan fungsinya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

Agar cara pandang jauh kedepan dan apa yang akan dicapai dapat eksis, anti sipasi, dan inovatif maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban”.

Dan untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Misi antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.



Berdasarkan Misi tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mengemban Misi ke 3 (tiga) yaitu “*Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat*”

Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program *smart city* plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (*star up*)

Berdasarkan program prioritas tersebut diatas akan didukung oleh program yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda tahun 2021-2026, adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan yang ingin di capai dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.



Tabel 3.2.

Indikator Tujuan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tujuan
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham kegiatan Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial dibagi yang belum memahami di kalikan 100%	100%

Sasaran Jangka Menengah RPJMD

Dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sasaran strategi dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial

Adapun tujuan dan sasaran serta target yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021- 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tujuan							
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran							
1	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial.							

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menetapkan strategi dan arah kebijakan yang digambarkan pada table berikut :



Tabel : 3.3
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI WALIKOTA SAMARINDA 2021-2026		“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”		
MISI – 3		Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki Wawasan dan Karakter Kebangsaan.	Revolusi Mental
	Terciptanya Pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

3.4 Program Dan Kegiatan

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda terutama misi 3 yaitu *Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi Masyarakat;*
 - Pencapaian SDGs, pada kegiatan pelayanan tidak membedakan Gender;
 - Pencapaian NSPK dan SPM, pada kegiatan pelayanan mengenai persyaratan, prosedur pembuatan, waktu layanan dan pengaduan layanan.



- Strategi dan arah Kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda 2021-2026
 - Usulan Musrenbang dari Kecamatan dan Pokir DPRD Kota Samarinda.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Program yang direncanakan sebanyak 6 program
 - Kegiatan yang direncanakan sebanyak 12 kegiatan
 - Sub Kegiatan yang direncanakan sebanyak 39 sub kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
Berdasarkan dengan usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokir DPRD Kota Samarinda untuk kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
 - Total kebutuhan dana / pagu indikatif
Total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk tahun 2025 yang diinput pada Aplikasi SIPD RI Kemendagri adalah Rp. 23.533.207.642,- bersumber dari APBD Kota Samarinda untuk menunjang kegiatan yang menjadi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.
- a. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada rancangan awal sebesar Rp. 100.000.000,- rancangan akhir menjadi Rp. 150.000.000, dikarenakan adanya Diklat Pengembangan SDM
- Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada rancangan awal sebesar Rp. 180.000.000,- rancangan akhir menjadi Rp. 100.000.000,- dikarenakan efisiensi anggaran.



- b. Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada rancangan awal sebesar Rp. 2.721.452.700,- rancangan akhir menjadi Rp. 2.150.000.000,- dikarenakan Pemerintah lebih memprioritaskan Pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur (kebutuhan masyarakat).
- b. Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada rancangan awal sebesar Rp. 6.102.519.121,- menjadi rancangan akhir Rp. 3.750.000.000,- dikarenakan Pemerintah lebih memprioritaskan Pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur (kebutuhan masyarakat).

Pada sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada rancangan awal sebesar Rp. 2.200.000.000,- menjadi rancangan akhir Rp. 2.250.000.000,- dikarenakan memenuhi usulan anggaran dana hibah KPU dan Bawaslu.

- c. Pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada rancangan awal sebesar Rp. 550.000.000,- menjadi rancangan akhir Rp. 280.000.000,- dikarenakan Pemerintah lebih memprioritaskan Pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur (kebutuhan masyarakat).



- d. Pada Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada rancangan awal sebesar Rp. 1.322.005.000,- menjadi rancangan akhir Rp. 1.180.000.000,- dikarenakan Pemerintah lebih memprioritaskan Pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur (kebutuhan masyarakat).
- e. Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada rancangan awal sebesar Rp. 2.582.454.450,- menjadi rancangan akhir Rp. 2.350.000.000,- dikarenakan Pemerintah lebih memprioritaskan Pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur (kebutuhan masyarakat).

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada rancangan awal sebesar Rp. 2.200.000.000,- menjadi rancangan akhir Rp. 2.000.000.000,- dikarenakan Pemerintah lebih memprioritaskan Pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur (kebutuhan masyarakat).

Secara keseluruhan terdapat perbedaan pagu anggaran dari rancangan awal Rp. 27.504.055.271,- Menjadi rancangan akhir Rp. 19.501.574.675,-

Berikut Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (Terlampir : Tabel. 33)

Tabel.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Kota Samarinda	76,70 nilai	9,791,574,675	APBD		76,80 nilai	14,160,664,704
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		80,4 nilai	250,000,000			80,5 nilai	90,040,704
8.01.01.2.01.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	150,000,000			5 Dokumen	33,765,264
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	50,000,000			1 Laporan	33,765,264
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50,000,000			1 Laporan	22,510,176
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		12 Laporan	8,110,950,675			12 Laporan	11,450,000,000
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65 orang/bulan	6,991,340,247			65 orang/bulan	10,000,000,000
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		40 dokumen	1,069,610,428			40 dokumen	1,400,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Laporan	50,000,000			5 Laporan	50,000,000
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai		105 orang	160,000,000			105 orang	250,000,000
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100 paket	60,000,000			110 paket	60,000,000
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 orang	100,000,000			20 orang	190,000,000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		12 Laporan	437,500,000			12 Laporan	537,500,000
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		12 Paket	10,000,000			12 Paket	10,000,000
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12 Paket	100,000,000			12 Paket	200,000,000
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		3 paket	10,000,000			3 paket	10,000,000
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		5 paket	17,500,000			5 paket	17,500,000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		12 paket	35,000,000			12 paket	35,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		4 dokumen	3,000,000			4 dokumen	3,000,000
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 laporan	12,000,000			4 laporan	12,000,000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	250,000,000			30 Laporan	250,000,000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang		12 Laporan	73,124,000			12 Laporan	73,124,000
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		2 Unit	63,124,000			2 Unit	63,124,000
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		12 unit	10,000,000			12 unit	10,000,000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	600,000,000.00			12 Laporan	1,600,000,000
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	25,000,000			12 Laporan	25,000,000
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36 Laporan	50,000,000			36 Laporan	50,000,000
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12 Laporan	500,000,000			12 Laporan	1,500,000,000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		10 Laporan	25,000,000			10 Laporan	25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan		12 Laporan	160,000,000			12 Laporan	160,000,000
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 Unit	70,000,000			18 Unit	70,000,000
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara		12 Unit	10,000,000			12 Unit	10,000,000
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	80,000,000			1unit	80,000,000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	Kota Samarinda	33.33%	2,150,000,000	APBD		41,67%	3,800,000,000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1200 Orang	2,150,000,000			1500 Orang	3,800,000,000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		800 Orang	300,000,000			900 Orang	700,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		8 Laporan	100,000,000			8 Laporan	300,000,000
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		4 Dokumen	150,000,000			5 Dokumen	400,000,000
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		300 Orang	1,500,000,000			300 Orang	2,100,000,000
8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.		40 Orang	100,000,000			80 Orang	300,000,000
	Tour and Travel di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kunjungan		1000 Orang	2,000,000,000			1000 Orang	2,000,000,000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	Kota Samarinda	100%	3,750,000,000	APBD		100%	7,124,594,695

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan		1200 Orang	3,750,000,000			1200 Orang	7,124,594,695
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		10 Dokumen	2,250,000,000			10 Dokumen	3,000,000,000
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2500 orang	1,000,000,000			2500 orang	2,574,594,695

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12 Laporan	500,000,000			12 Laporan	1,550,000,000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	Kota Samarinda	17.07%	280,000,000	APBD		20.73%	500,000,000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina		45 Ormas	280,000,000			60 Ormas	500,000,000
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		600 Orang	130,000,000			600 Orang	250,000,000
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50 Laporan	150,000,000			60 Laporan	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	Kota Samarinda	45%	1,180,000,000	APBD		45%	906,478,964
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		45 Laporan	1,180,000,000			45 Laporan	906,478,964
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		600 Orang	150,000,000			600 Orang	453,239,482
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		30 Laporan	1,030,000,000			33 Laporan	453,239,482
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	Kota Samarinda	20%	2,350,000,000	APBD		20%	2,850,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani		24 Kasus	2,350,000,000			24 Kasus	2,850,000,000
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1500 Orang	250,000,000			1500 Orang	400,000,000
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		14 Laporan	100,000,000			14 Laporan	250,000,000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		12 Dokumen	2,000,000,000			13 Dokumen	2,200,000,000
TOTAL					19,501,574,675	TOTAL		29,341,738,363	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda termasuk dalam program prioritas Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang dijabarkan melalui Rencana Kerja (RENJA).

Program yang menjadi prioritas dapat menjadi tolak ukur indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Capaian indikator kinerja ini merupakan data-data informasi dalam menentukan kebijakan baik dalam perencanaan anggaran maupun masalah-masalah yang berkembang dimasyarakat saat ini.

Perencanaan anggaran dan pendanaan indikatif didasarkan pada program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik bersumber dari APBD Pemerintah Kota Samarinda, APBD Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur maupun APBN.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2026 merupakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 6 (enam) Program;
3. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 12 (dua belas) Kegiatan;.
4. Jumlah Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025 dengan total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Adalah Sebesar **Rp. 19.501.574.675,-**. Dengan Rincian Sebagai Berikut, **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** Sebesar **Rp. 9.791.574.675,-**. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan** Sebesar **Rp. 2.150.000.000,-**. **Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** Sebesar **Rp. 3.750.000.000,-**. **Program**



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Jalan Balaikota No. 27 Samarinda Kode Pos : 75121

Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sebesar Rp. 280.000.000,-. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Sebesar Rp. 1.180.000.000,-. Dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Sebesar Rp. 2.350.000.000,-.

Tabel
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang telah diinput di SIPD RI
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDAKOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda														29,241,738,363		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														29,241,738,363		
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														29,241,738,363		
1	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	88 Nilai	76.6 Nilai	76.7 Nilai	88 Nilai	9,791,574,675					88 Nilai	14,060,664,704				
	8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	80,7 Nilai	80.2 Nilai	80.40 Nilai	80,5 NILAI	250,000,000				- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	80,6 NILAI	90,040,704			
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	5 Dokumen	33,765,264	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA		
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	1 Laporan	33,765,264	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA		
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	1 Laporan	22,510,176	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA		
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	28 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	8,110,950,675				- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	12 Laporan	11,450,000,000			
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang/Bulan	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6,991,340,247	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	65 Orang/bulan	10,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA		
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	1,069,610,428	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	40 Dokumen	1,400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	5 Laporan	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
						Jumlah Pegawai	420 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	160,000,000			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	105 Orang	250,000,000		
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	90 Paket	90 Paket	100 Paket	60,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	110 Paket	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	0	0	20 Orang	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	20 Orang	190,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
						Jumlah laporan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	437,500,000			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	12 Laporan	437,500,000		
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	10,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	12 Paket	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	12 Paket	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	0	0	5 Paket	10,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	3 Paket	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	17,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	5 Paket	17,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	35,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	12 Paket	35,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	0	0	4 Dokumen	3,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	4 Dokumen	3,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	0	4 Laporan	12,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	4 Laporan	12,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	30 Laporan	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	30 Laporan	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	0	0	12 Laporan	73,124,000			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	12 Laporan	73,124,000		
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	0	0	2 Unit	63,124,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	2 Unit	63,124,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	10,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	12 Unit	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	80,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN	1 Unit	80,000,000.0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
2	8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	30%	20.83%	25%	33.33 %	2,150,000,000							41.67%	3,800,000,000	
	8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4494 Orang	500 Orang	1075 Orang	1200 Orang	2,150,000,000				-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat dan Pelajar	1500 Orang	3,800,000,000	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	19594 Orang	894	1075 Orang	800 Orang	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat dan Pelajar	900 Orang	700,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	39 Laporan	3 Laporan	11 Laporan	8 Laporan	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat dan Pelajar	8 Laporan	300,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka															
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	13 Dokumen	0	0	4 Dokumen	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat dan Pelajar	4 Dokumen	400,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka															
							Jumlah Paskibraka	900 Orang	0	0	300 Orang	1,500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat dan Pelajar	300 Orang	2,100,000,000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	248 Laporan	200 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Mahasiswa dan Partai Politik	12 Laporan	1,550,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	16.34%	13.41%	14.63%	17,07 %	280,000,000						20.73%	500,000,000	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	153 Ormas	11 Ormas	23 Ormas	45 Ormas	280,000,000			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Ormas dan LSM	60 Ormas	500,000,000	
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2400 Orang	300 Orang	540 Orang	600 Orang	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Ormas dan LSM	600 Orang	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	185 Laporan	23 Laporan	12 Laporan	50 Laporan	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Ormas dan LSM	60 Laporan	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	39%	30%	35%	45 %	1,180,000,000						45 %	906,478,964	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	165 Laporan	30 Laporan	35 Laporan	45 Laporan	1,180,000,000			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat	45 Laporan	906,478,964	
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2400 Orang	325 Orang	220 Orang	600 Orang	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat	600 Orang	453,239,482	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	108 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	30 Laporan	1,030,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat	33 Laporan	453,239,482	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
6	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20 %	20 %	20 %	20 %	2,350,000,000							20 %	2,850,000,000	
	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	96 Kasus	24 Kasus	24 Kasus	24 Kasus	2,350,000,000				7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Forkopimda, FKDM dan Lembaga terkait	24 Kasus	2,850,000,000		
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4750 Orang	300 Orang	285 Orang	1500 Orang	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Forkopimda, FKDM dan Lembaga terkait	1500 Orang	400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 Laporan	23 Laporan	13 Laporan	14 Laporan	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Forkopimda, FKDM dan Lembaga terkait	14 Laporan	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA			
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Forkopimda, FKDM dan Lembaga terkait	13 Dokumen	2,200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
J U M L A H								19.501.574.675,00							29.341.738.363,00				



BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah urusan pemerintahan umum yang mengacu pada RKPD Kota Samarinda tahun 2024, dan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kta Samarinda tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam program prioritas pembangunan Kota Samarinda tahun 2025, yang memuat arah kebijakan, program kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan pagu indikatif dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil tersebut.

Perencanaan yang meliputi penyusunan dan penetapan, tahapan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana diselenggarakan secara tepat syarat. Untuk memudahkan pembuktian kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan termuat dalam penjabaran RKA dalam pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya. Pelaksanaan tiap sub kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda di tahun 2025.



b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Prioritas Anggaran, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan kerja tersebut ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dan seluruh Stakeholders pembangunan/pihak-pihak terkait untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana Kerja ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
3. Sebagai upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun yang bersumber dari APBN, maka setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda perlu membuat Rencana Kerja.
4. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025, sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda serta Prioritas dan Pagu Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025.

Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda tahun 2025, disusun untuk mendukung pencapaian indikator sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda Tahun 2021-2026, serta RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026.



c. Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, bukan semata memanfaatkan sumberdana saja melainkan memaksimalkan seluruh sumberdaya yang ada dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kota. Untuk itu dibutuhkan rencana tindak lanjut terhadap Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda :

1. Mengevaluasi ulang hasil-hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dengan mempertahankan capaian-capaian positif indikator masing-masing kegiatan dan meningkatkan hasil (output)nya.
2. Memfokuskan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berorientasi pada hasil yang memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Realistic, dan Timely/Time bound);
3. Mengintensifkan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan maupun melalui Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dibuat kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Semoga upaya-upaya kita dalam meningkatkan kinerja pemerintah Kota Samarinda mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT.

Samarinda, 22 Juli 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda



SUCIPTO, S.Pd.,M.Si.

NIP. 19670319 199702 1 003